



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

KABUPATEN PASAMAN BARAT

TAHUN 2023

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN PASAMAN BARAT

TAHUN 2023



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Renja PD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Pasal 2

Renja PD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai dasar acuan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan Perangkat Daerah yang dibiayai dengan anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

(1) Sistematika Renja PD Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V PENUTUP

(2) Renja PD Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Dinas Sosial;
- f. Dinas Tenaga Kerja;
- g. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Dinas Ketahanan Pangan;
- i. Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
- l. Dinas Perhubungan;
- m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- n. Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- r. Dinas Perikanan;
- s. Dinas Pariwisata;
- t. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- u. Dinas Perkebunan;
- v. Sekretariat Daerah;
- w. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- x. Inspektorat;
- y. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- z. Badan Aset dan Pendapatan Daerah;
- aa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- dd. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- ee. Rumah Sakit Umum Daerah;
- ff. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- gg. Kecamatan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 3 Agustus 2022



Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 3 Agustus 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 46

HENDRA PUTRA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat segala rahmat-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Dalam penyelesaian RENJA ini telah disesuaikan dengan alur dan mekanisme yang telah ditetapkan sebagai panduan penulisan dan telah disinkronkan dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Barat.

Demikianlah sebagai pengantar dari kami, semoga dapat dipergunakan bagi pihak yang membutuhkan, terima kasih.

Simpang Empat, 3 Agustus 2022

K e p a l a



dr.Hj. ANNA RAHMADIA

NIP. 19820927 200805 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1. Latar Belakang	1
1. 2. Landasan hukum	1
1. 3. Maksud dan Tujuan	3
1. 4. Sistematika Penyusunan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	6
2. 1.Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPKBP3A Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPPKBP3A.....	6
2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	11
2. 3.Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	14
2. 4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	14
2. 5.Penelaahan Terhadap Program dan Kegiatan Masyarakat....	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....	
3. 1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	35
3. 2.Telaahan Terhadap Renstra Kemen PPPA (Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2021).....	36
3. 3.Telaahan Terhadap Renstra KBKKBN (Perka BKKB Nomor 6 Tahun 2020.....	38
3. 4.Tujuan dan Sasaran Renja SOPD.....	40
3. 5.Program dan Kegiatan	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH....	62
BAB V PENUTUP.....	75

BAB 1 **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalisasikan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja SOPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja DPPKBP3A Tahun 2023 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2023. Sebagai satuan organisasi perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, perumusan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selanjutnya, Renja DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026;
26. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
31. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 46 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Recana Kerja (Renja) DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja DPPKBP3A serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron pada Tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Recana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan.
- b. Menyediakan suatu pedoman untuk pengendalian dan evaluasi kinerja tahunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi .

- c. Mengoptimalkan keterpaduan dan sinkronisasi program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran dan target kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- d. Mendukung seluruh jajaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat dalam memahami arah kebijakan dan program/kegiatan operasional tahunan untuk kurun waktu 1 tahun.

Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat sebagai wujud dari upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Lampiran 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 *Latar Belakang,*
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2 *Landasan Hukum,*
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah
- 1.3 *Maksud dan Tujuan,*
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4 *Sistematika Penulisan,*
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah,* Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, capaian Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,* memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

- 2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi* Perangkat Daerah, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals), tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional*, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2 *Tujuan dan sasaran Renja* Perangkat Daerah, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut

BAB II

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPKBP3A Tahun Lalu dan Capaian
Renstra DPPKBP3A**

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah . Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat mempunyai Rencana Strategis (RENSTRA) yang berorientasi pada keluaran (output) dan hasil (out come) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis ini merupakan perencanaan jangka menengah DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat yang berisi gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh DPPKBP3A beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut, mencakup visi,misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Selanjutnya untuk mewujudkan pencapaian target Renstra di atas dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang dilakukan setiap tahun sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah setiap tahunnya. Rencana Kinerja DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2023. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang ingin dicapai selama tahun 2023 dari semua indikator kinerja. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi-visinya. Berdasarkan capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan, secara umum kinerja DPPKBP3A tahun 2021 mampu mencapai target meskipun pada beberapa sasaran hasilnya kurang sebagaimana yang diharapkan. Sesuai dengan visi dan misi dalam tahun 2021, DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan 10 Program dan 23 kegiatan sesuai dengan skala prioritas melalui APBD Tahun Anggran 2021.

Evaluasi pelaksanaan Renja DPPKBP3A tahun 2021 memuat pencapaian target kinerja tahun 2021 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun anggaran 2021. Selain itu, evalusi pelaksanaan renja DPPKBP3A tahun 2021 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (tahun 2022), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DPPKBP3A pada tahun-tahun sebelumnya.

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja Operasi

Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang jasa yang ditinggalkan sebesar RP 9.881.645.145,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.099.766.001,- atau sebesar 73%.

b. Anggaran Belanja Modal

Belanja Modal pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2021 sebesar Rp 1.261.975.000 dan terealisasi sebesar Rp 990.974.700 atau sebesar 79%.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja DPPKBP3A tahun 2021 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja DPPKBP3A tahun 2021 berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut :

TABEL T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Pasaman Barat

OPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Nomor Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)	>800 Skor		550 Scor e	867 skor	157,64	650 Skor	867 skor	108
2.08.06.2. 01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)	>800 Score		550 Scor e	867 skor	157,64	600 Score	867 skor	108
02.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	% Penurunan kasus kekerasan terhadap anak	0 %		0.02 %	123,33	2,47	0.01 %	123,33	
2.08.07.2. 01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan terhadap anak per 100 jiwa anak	0 Rasio		0.02 Rasi o	0,06 rasio	33,33	0,02 Rasio	0,06 rasio	
2.08.07.2. 02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Korban Kekerasan terhadap Anak yang Mendapat Pelayanan	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100
2.08.07.2. 03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100
02.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Percentase ARG pada Belanja Langsung APBD	12 %		4.65 %	4,63	99,57	4.67 %	4.65 Persen	39
2.08.02.2. 01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG)	12,00		4,65	4,63	99,57	4,67	4.65 Persen	39
2.08.02.2. 02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Keterwakilan Perempuan dilembaga legislatif	30 %		7,50 %	7,50 %	100	7,50 %	7,50 %	25
02.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	0 %		0.47 %	11,21%	4,19	0.35 %	11,21%	-

Nomor Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	760 orang					130 orang	130 orang	17
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Layanan Pengaduan	100 Persen		100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	100 Persen					100 Persen	100 Persen	100
02.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	TPAK Perempuan	45.75 %		45.55 %	21,27	46,70	45.6 %	21,27	46
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat PArtisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK)	45,75%		45,55%	21,27	46,70	45,60%	21,27	46
02.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Percentase OPD yang menyediakan data terpilih gender	100 %		93 %	99 %	100 %	95 %	95 %	95
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase OPD yang Menyediakan Data Terpilih Gender	100,00		93,00%	99,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95
	Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk									
02.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate (TFR)	3 Indeks		3.05 Indeks	3.05 Indeks	100	3,05 Rasio	3.05 Indeks	98
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Peserta Sosialisasi	260		200	200	138,89	200	200	77
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Data Program Bangga Kecana	72 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	6 Dokumen	8
02.14.03.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	68 %		66,5 %	59,27%	89,13	66,5 %	62,53%	92
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Tersedianya Operasional Balai Penyuluhan KB	19 Nagari		11 BPKB	11 BPKB	100	19 Nagari	19 Nagari	100

Nomor Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan KB MKJP	22 Faskes 1535 Akseptor		22 Faskes 1520 Akseptor	22 Faskes 1293 Akseptor	100	22 Faskes 1520 Akseptor	22 Faskes 792 Akseptor	51,60
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Pembinaan Kesertaan KB	11 Kecamatan		11 Kecamatan	11 Kecamatan	100	11 Kecamatan	11 Kecamatan	100
02.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Prevalensi Stunting	14 Persen		14%	18%	77,78	18 Persen	20,5	64,52
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	75%		65 Persen	21,7 Persen	33	65 Persen	21,7 Persen	28,93
		Nilai SAKIP	B Nilai		B Nilai	B Nilai	100	B Nilai	B Nilai	100
		Level Maturitas SPIP	Level3 Level		Level 3 Level			Level 3 Level		
		Opini Terhadap Laporan Keuangan	WTP Level		WTP Level			WTP Level		
		Nilai SAKIP	B		B	BB	100	B	B	100
02.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Level Maturitas SPIP	Level3 Level		Level 3 Level			Level 3 Level		
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK atas Laporan Keuangan	100 %		75 %			Level 3 Level		
2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Non PNS (PTT/THL) Penunjang Administrasi Perkantoran dan Penerima Honorarium Pegawai	22 org		22 org	22 org	100	22 org	18 org	81,82
2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	60%	60
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	60%	60
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Blanko SPT, SPPD, Kuitansi, dan Map DPPKBP3A yang Dibutuhkan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	6 Bulan	50
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan Elektronik Penunjang Operasional Kantor dan Administrasi Perkantoran	30 Unit		6 Unit	0	0	6 Unit	0	0
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	60%	60

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Berdasarkan telaahan terhadap Visi , Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdapat pada dokumen RPJMD 2021-2026, memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan secara langsung Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terutama mendukung pencapaian **Misi ke 1** yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif untuk mencapai sasaran 1. Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel, serta **Misi ke 2** yaitu **Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing** Dengan menfokuskan pada tujuan 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing untuk mencapai sasaran 3. Terwujudnya penduduk yang tumbuh seimbang dan berkualitas. **Misi 3 Mewujudkan Perekonomian yang tangguh dan berdaya saing** dengan memfokuskan pada Tujuan 4. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan dengan sasaran 4.1 Pengentasan Kemiskinan dengan 2 (dua) indikator utama, yakni:

- 1) Indeks Pembangunan Gender (IPG) ditargetkan mencapai 92 pada tahun 2026.
- 2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) ditargetkan mencapai 68 pada tahun 2026.
- 3) Predikat Kabupaten Layak Anak ditargetkan mencapai 820 (Utama) pada tahun 2026.
- 4) Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) ditargetkan mencapai 1,12 pada tahun 2026.

DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat juga mengalami beberapa kendala dalam pencapaian target kinerjanya sesuai RPJMD, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya kesadaran dan pemahaman pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait seputar mekanisme perencanaan pembangunan daerah, seperti yang diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 2) Kurang optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah
- 3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kualitas maupun kuantitasnya.

Perencanaan pelayanan DPPKBP3A Tahun 2020 merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pelayanan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pelayanan tahun sebelumnya. Dalam 2 (dua) tahun pelaksanaan Rencana Strategi (RENSTRA) telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pelayanan di daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pelayanan di daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum

didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Keberhasilan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tidak terlepas dari pengaruh situasi kondisi masalah kependudukan Kabupaten Pasaman Barat saat ini, dan telah menunjukkan hasil – hasilnya yang semakin menggembirakan dengan karakteristik potensi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada. Sasaran program kegiatan tahun 2020 telah terlaksana dengan baik meski dengan beberapa catatan untuk perbaikan tahun berikutnya Analisis terhadap kinerja pelayanan tentang capaian kinerja pelayanan DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada tabel T-C.30 berikut:

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pasaman Barat

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra DPPKBP3A				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
1	Predikat pencapaian KLA			Madya (620)	Madya (650)	Nindya (720)	Nindya (750)	Madya (867) Predikat	Madya	Nindya	Nindya		
2	Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)			500	Madya (2)	Madya (2)	Madya (2)	867 Nilai	Madya	Nindya	Nindya		
3	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan			0,58	0,47	0,35	0,23	0,9	0,47	0,35	0,23		
4	% Penurunan kasus kekerasan terhadap anak			0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%		
5	Rasio Kekerasan Terhadap Anak			0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01		
6	IPG			90,38	90,71	91,03 Indeks	91,35 Indeks	90,38	90,38	91,03 Indeks	91,35 Indeks		
7	Predikat APE			Pratama (1) Predikat	Madya (2) Predikat	Madya (2) Predikat	Madya (2) Predikat	Pratama (1) Predikat	Madya (2) Predikat	Madya (2) Predikat	Madya (2) Predikat		
8	IDG			62,07	63,25 Indeks	64,44 Indeks	65,63 Indeks	62,07	63,25 Indeks	64,44 Indeks	65,63 Indeks		
9	TPAK Perempuan			45,5	45,6	45,65	45,7	45,5	45,6	45,65	45,7		
10	Keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif			64,79	65,00	65,20%	65,40%	64,79	65,00	65,20%	65,40%		
11	Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif			7,5	7,5	7,5	30,00%	7,50%	7,5	7,5	30,00%		
12	Percentase besaran anggaran responsive gender terhadap total anggaran Belanja Langsung APBD			4,63	4,65	4,67%	8,00%	4,63	4,65	4,67%	8,00%		
13	% OPD yang menyediakan data terpisah gender			91%	93%	95,00%	97,00%	91%	93%	95,00%	97,00%		
14	Laju Pertumbuhan Penduduk			1,24%	1,23%	1,22%	1,21%	1,24%	1,23%	1,22%	1,21%		
15	Modern contraceptive Prevalence Rate (mCPR)			66	66,25	66,50%	66,75%	66	66,25	66,50%	66,75%		
16	TFR			3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05		
17	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)			60	63	65,00	70,00	21,7	63	65,00	70,00		

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu kependudukan telah sejak lama menjadi isu penting di Indonesia seiring dengan dinamika dan meningkatnya kompleksitas permasalahan kependudukan itu sendiri. Dinamika dan kompleksitas kependudukan, seperti cepatnya laju pertumbuhan penduduk, tingginya angka kematian bayi atau ibu melahirkan, perubahan struktur umur, pergerakan penduduk, dan sebagainya, perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dan pemangku kepentingannya. Semua itu selain disebabkan oleh cukup banyak faktor yang kompleks, juga mendorong terjadinya berbagai persoalan yang kompleks pula, seperti kepadatan penduduk, keterbatasan kesempatan kerja, degradasi kualitas lingkungan, merosotnya kesejahteraan sosial, dan sebagainya. Diperlukan kebijakan pembangunan dan kependudukan yang integratif untuk mengendalikan kuantitas dan persebaran serta memperbaiki kualitas penduduk, baik untuk aspek kesehatan, pendidikan, dan perekonomiannya serta masih tingginya kasus-kasus kekerasan baik terhadap perempuan maupun terhadap anak.

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah:

- 1) Meningkatnya pengendalian kuantitas penduduk melalui kebutuhan dan memperluas pelayanan Keluarga Berencana (KB), Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Sejahtera
- 2) Memperkuat peran dan fungsi pengarusutamaan gender (PUG)
- 3) Meningkatkan integrasi perlindungan perempuan, anak dan pemenuhan hak anak dengan kebijakan pembangunan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

TABEL T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Pasaman Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					552,959,271	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
I	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	8 %	83,079,880	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	8 %	83,079,880	
1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Anggaran yang Responsive Gender (ARG)	8 %	30,075,299	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Anggaran yang Responsive Gender (ARG)	8 %	30,075,299	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Perangkat Daerah	30,075,299	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Perangkat Daerah	30,075,299	
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan		Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif	30 %	53,004,581	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan		Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif	30 %	53,004,581	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		
			Indikator Kinerja	Target Capaian				Indikator Kinerja	Target Capaian			
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik	31 Organisasi	53,004,581	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Organisasi	53,004,581		
II	PROGRAM PERLINDUNGAN		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	0.23 %	136,499,182	PROGRAM PERLINDUNGAN		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	0.23 %	136,499,182		
1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	0.23 %	40,000,000	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	0.23 %	40,000,000		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	40,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	40,000,000		
			Jumlah Peserta Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan	130 Orang				Jumlah Peserta Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap	130 Orang			
2	Penyediaan Layanan		Percentase Korban	100 %	86,499,182	Penyediaan Layanan		Percentase Korban	100 %	86,499,182		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Layanan	86,499,182	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan	12 Layanan	86,499,182		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		
			Indikator Kinerja	Target Capaian				Indikator Kinerja	Target Capaian			
			Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Layanan Pengaduan	100 %				Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Layanan Pengaduan	100 %			
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	100 %	10,000,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	100 %	10,000,000		
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kelurahan	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Layanan Pengaduan	36 Orang	10,000,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kelurahan	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	36 Orang	10,000,000		
			Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan	100 %				Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan	100 %			
III	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		TPAK Perempuan	45.6 %	19,755,500	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		TPAK Perempuan	45.6 %	19,755,500		
1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK)	45.6 %	19,755,500	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK)	45.6 %	19,755,500		
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	19,755,500	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	19,755,500		
			Jumlah Pekerja Wanita yang Mendapatkan Pelatihan (Orang)	60 Orang				Jumlah Pekerja Wanita yang Mendapatkan Pelatihan (Orang)	60 Orang			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase OPD yang menyediakan data terpisah gender	97 %	31,248,000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase OPD yang menyediakan data terpisah gender	97 %	31,248,000	
1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase OPD yang Menyediakan Data Terpisah Gender	97 %	31,248,000	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase OPD yang Menyediakan Data Terpisah Gender	97 %	31,248,000	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	31,248,000	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	31,248,000	
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Data Gender dan Anak dan Tersedianya Buku Profil Gender dan Anak	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Data Gender dan Anak dan Tersedianya Buku Profil Gender dan Anak	1 Dokumen		
			Jumlah SDM yang Terlatih	41 Orang				Jumlah SDM yang Terlatih	41 Orang		
V	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)	700 Skor	65,033,025	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)	700 Skor	65,033,025	
1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)	700 score	65,033,025	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)	700 score	65,033,025	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		
			Indikator Kinerja	Target Capaian				Indikator Kinerja	Target Capaian			
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media	60 Organisasi	35,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	60 Organisasi	35,000,000		
			Total score pemenuhan hak	700 score				Total score pemenuhan hak anak	700 score			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30,033,025	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30,033,025		
			Persentase Forum Anak Aktif	90 %				Persentase Forum Anak Aktif	90 %			
VI	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		% Penurunan kasus kekerasan terhadap anak0	0,01 %	217,343,684	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		% Penurunan kasus kekerasan terhadap anak0	0,01 %	217,343,684		
1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah		Menurunnya Rasio kekerasan terhadap anak per 100 jiwa anak	0.02 Rasio	35,000,000	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah		Menurunnya Rasio kekerasan terhadap anak per 100 jiwa anak	0.02 Rasio	35,000,000		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	35,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	35,000,000		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		
			Indikator Kinerja	Target Capaian				Indikator Kinerja	Target Capaian			
			Jumlah Peserta Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	200 Orang				Jumlah Peserta Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	200 Orang			
2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak yang Mendapat Pelayanan	100 %	132,343,684	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak yang Mendapat Pelayanan	100 %	132,343,684		
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	25,000,000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	25,000,000		
			Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang Mendapat Pelayanan	100 %				Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang Mendapat Pelayanan	100 %			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Layanan	107,343,684	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Layanan	107,343,684		
			Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang Mendapat Pelayanan	100 %				Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang Mendapat Pelayanan	100 %			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		
			Indikator Kinerja	Target Capaian				Indikator Kinerja	Target Capaian			
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah		Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak	100 %	50,000,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah		Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan	100 %	50,000,000		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50,000,000		
			Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %				Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				9,187,191,594	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				9,187,191,594		
VII	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100 %	6,690,574,564	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	6,690,574,564		
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya kegiatan	100 %	5,644,031,668	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya kegiatan Administrasi	100 %	5,644,031,668		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		
			Indikator Kinerja	Target Capaian				Indikator Kinerja	Target Capaian			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	5,262,131,668	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	5,262,131,668		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30 Dokumen	304,500,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30 Dokumen	304,500,000		
			Jumlah Non PNS (PTT/THL) Penunjang Adminsitrasii Perkantoran dan Penerima Honorarium Pegawai	22 Orang				Jumlah Non PNS (PTT/THL) Penunjang Adminsitrasii Perkantoran dan Penerima Honorarium Pegawai	22 Orang			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	80 Dokumen	77,400,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	80 Dokumen	77,400,000		
			Jumlah Petugas Pengelola Keuangan yang Menerima Honorarium	5 Orang				Jumlah Petugas Pengelola Keuangan yang Menerima Honorarium	5 Orang			
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya kegiatan	100 %	34,858,400	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya kegiatan Administrasi Barang	100 %	34,858,400		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	34,858,400	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	34,858,400		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		
			Indikator Kinerja	Target Capaian				Indikator Kinerja	Target Capaian			
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya kegiatan		60,803,642	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya kegiatan Administrasi		60,803,642		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		60,803,642	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		60,803,642		
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya kegiatan	100 %	292,190,880	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya kegiatan <u>Administrasi Umum</u>	100 %	292,190,880		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	25,059,280	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	25,059,280		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ATK yang Dibutuhkan	12 Bulan	25,175,700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ATK yang Dibutuhkan	12 Bulan	25,175,700		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	32,061,500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	32,061,500		
			Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Alat Pembersih	12 Bulan				Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Alat Pembersih	12 Bulan			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		
			Indikator Kinerja	Target Capaian				Indikator Kinerja	Target Capaian			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	17,135,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	17,135,000		
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	192,759,400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	192,759,400		
			Jumlah Penyediaan Makan/Minum Rapat Koordinasi Jumlah Rapat Koordinasi dari Pemerintah Provinsi dan Pusat K/L yang Diikuti	12 Bulan				Jumlah Penyediaan Makan/Minum Rapat Koordinasi Jumlah Rapat Koordinasi dari Pemerintah Provinsi dan Pusat K/L yang Diikuti	12 Bulan			
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase terpenuhinya Kebutuhan	100 %	205,704,839	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Barang	100 %	205,704,839		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	98,667,621	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	98,667,621		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	107,037,218	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	107,037,218		
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan	100 %	91,334,935	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan	100 %	91,334,935		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		
			Indikator Kinerja	Target Capaian				Indikator Kinerja	Target Capaian			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	91,334,935	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	91,334,935		
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Persentase terpenuhinya Pemeliharaan	100 %	361,650,200	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Persentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang	100 %	361,650,200		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	67 Unit	189,905,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	67 Unit	189,905,000		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	62,569,200	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	62,569,200		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	109,176,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	109,176,000		
VIII	PROGRAM PENGENDALIAN		Total Fertility Rate (TFR)	3,05 Indeks	114,383,457	PROGRAM PENGENDALIAN		Total Fertility Rate (TFR)	3,05 Indeks	114,383,457		
1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan PEserta Sosialisasi	240 orang	78,352,457	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan PEserta Sosialisasi	240 orang	78,352,457		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		
			Indikator Kinerja	Target Capaian				Indikator Kinerja	Target Capaian			
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Sosialisasi PIK R/M di Sekolah-sekolah	200 Orang	52,491,151	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Sosialisasi PIK R/M di Sekolah-sekolah	200 Orang	52,491,151		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	10 Satuan Pendidikan				Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	10 Satuan Pendidikan			
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	25,861,306	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	25,861,306		
			Terlaksananya Tindak Lanjut dan Audit Stunting	1 Keg				Terlaksananya Tindak Lanjut dan Audit Stunting	1 Keg			
2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kecamatan/Kota		Tersedianya Laporan Data Program Bangga Kencana	132 Dokumen	36,031,000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kecamatan/Kota		Tersedianya Laporan Data Program Bangga Kencana	132 Dokumen	36,031,000		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		
			Indikator Kinerja	Target Capaian				Indikator Kinerja	Target Capaian			
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	132 Dokumen	20,000,000	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	132 Dokumen	20,000,000		
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	132 Dokumen	16,031,000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	132 Dokumen	16,031,000		
IX	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KPB)		Angka pemakaian kontrasepsi modern /	66,5 %	1,842,942,073	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KPB)		Angka pemakaian kontrasepsi modern /	66,5 %	1,842,942,073		
1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan		Tersedianya Media KIE dan Operasional Penyuluh KB Di Kecamatan	11 Kecamatan, Faskes	360,000,000	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan		Tersedianya Media KIE dan Operasional Penyuluh KB Di Kecamatan	11 Kecamatan, Faskes	360,000,000		
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	20 Organisasi	30,000,000	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	20 Organisasi	30,000,000		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			
			Indikator Kinerja	Target Capaian					Indikator Kinerja	Target Capaian		
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	12 Dokumen	85,000,000	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	12 Dokumen	85,000,000		
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	12 Dokumen	25,000,000	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	12 Dokumen	25,000,000		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		
			Indikator Kinerja	Target Capaian				Indikator Kinerja	Target Capaian			
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcum), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcum), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	66 Laporan	100,000,000	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcum), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcum), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	66 Laporan	100,000,000		
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	132 Laporan	120,000,000	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	132 Laporan	120,000,000		
2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Tersedianya operasional pembinaan		91,200,000	Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Tersedianya operasional pembinaan		91,200,000		
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		91,200,000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		91,200,000		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		
			Indikator Kinerja	Target Capaian				Indikator Kinerja	Target Capaian			
3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah		Terlaksananya Pelayanan KB MKJP	1520 Akseptor	1,114,742,073	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah		Terlaksananya Pelayanan KB MKJP	1520 Akseptor	1,114,742,073		
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	264 Laporan	58,815,000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	264 Laporan	58,815,000		
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1496 Orang	410,000,000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1496 Orang	410,000,000		
			Terlaksananya Pergerakan Pelayanan KB MKJP(IUD, Implant, MOP, dan MOW)	1496 Akseptor				Terlaksananya Pergerakan Pelayanan KB MKJP(IUD, Implant, MOP, dan MOW)	1496 Akseptor			
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	43 Unit	545,927,073	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	43 Unit	545,927,073		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			
			Indikator Kinerja	Target Capaian					Indikator Kinerja	Target Capaian		
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	264 Laporan	100,000,000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	264 Laporan	100,000,000		
4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan		Terlaksananya Pembinaan Pembinaan Program KB bagi masyarakat oleh Kader	11 Kecamatan	277,000,000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan		Terlaksananya Pembinaan Pembinaan Program KB bagi masyarakat oleh Kader	11 Kecamatan	277,000,000		
	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	10 Organisasi	150,000,000	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	10 Organisasi	150,000,000		
			Terlaksananya Kegiatan TNI Manunggal KB Kes dan PKK KB Kes	11 Kecamatan				Terlaksananya Kegiatan TNI Manunggal KB Kes dan PKK KB Kes	11 Kecamatan			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		
			Indikator Kinerja	Target Capaian				Indikator Kinerja	Target Capaian			
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	19 Kampung	127,000,000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	19 Kampung	127,000,000		
X	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	65 %	539,291,500	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	65 %	539,291,500		
1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Terlaksananya Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	11 Kecamatan	539,291,500	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Terlaksananya Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	11 Kecamatan	539,291,500		
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)		Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	45 Kelompok	45,000,000	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)		Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	45 Kelompok	45,000,000		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		
			Indikator Kinerja	Target Capaian				Indikator Kinerja	Target Capaian			
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Unit	180,000,000	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Unit	180,000,000		
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	465 Orang	239,291,500	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	465 Orang	239,291,500		
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	231 Kelompok	75,000,000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	231 Kelompok	75,000,000		
					9,740,150,865					9,740,150,865		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan didapatkan dari hasil Musrenbang, Forum OPD maupun usulan lainnya dari masyarakat dan untuk Tahun 2023 tidak ada usulan kegiatan dari masyarakat untuk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, ada 7 agenda Prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja.
5. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

Sementara itu, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 menyebutkan bahwa penekanan dan skala prioritas RPJMD ke-4 (2021-2026) secara umum ditujukan untuk mewujudkan pemantapan landasan pembangunan dengan penekanan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi maju di bidang pertanian, perdagangan, dan jasa.

Kemampuan pengembangan dan pemanfaatan teknologi maju akan meningkatkan daya saing produk dan jasa dari wilayah Provinsi Sumatera Barat, sehingga dapat ditingkatkan nilai tambah yang dapat diterima masyarakat, baik petani, nelayan, pedagang, dan pengusaha jasa, termasuk jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Dengan demikian, tingkat pengangguran dan kemiskinan akan dapat dikurangi, sehingga akses masyarakat ke bidang pendidikan dan kesehatan juga semakin membaik. Secara lebih rinci, arahan kebijakan nasional dan provinsi pada periode 2014-2019 dapat dituangkan pada tabel 3.1 berikut

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kabupaten Pasaman Barat

No.	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Keterangan
I	Nasional		
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	RKP 2023	
2.	Angka Kemiskinan Nasional	RKP 2023	
3.	Gini Ratio Nasional	RKP 2023	
4.	Indeks Pembangunan Manusia Nasional	RKP 2023	
II	Provinsi		
1.	Pembangunan Agama dan Budaya	RPJP Provinsi 2005-2025	
2.	Pembangunan Pemerintahan dan Hukum	RPJP Provinsi 2005-2025	
3.	Pembangunan Sumber Daya Manusia	RPJP Provinsi 2005-2025	
4.	Pembangunan Ekonomi	RPJP Provinsi 2005-2025	
5.	Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	RPJP Provinsi 2005-2025	

3.2. Telahaan terhadap Renstra Kemen PPPA (Permen PPPA Nomor 6 tahun 2021)

- a. Permasalahan terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, meliputi:
 - 1) Kualitas hidup perempuan: masih tingginya angka kematian ibu melahirkan, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang rendah, pengeluaran per kapita perempuan jauh lebih rendah dibanding laki-laki, perempuan dilegislatif belum mencapai kuota yang ditetapkan regulasi
 - 2) Perlindungan Hak Perempuan: tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, diranah privat (KDRT) maupun ranah publik, tingginya tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan untuk eksplorasi seksual komersil dan kerja paksa, rendahnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Tenaga Kerja Perempuan di sektor informal, belum optimalnya kelembagaan perlindungan hak perempuan (UPTD PPA atau P2TP2A) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan pada situasi konflik dan bencana, perlindungan terhadap kelompok lansia, penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi dan perlakuan kurang adil,

- 3) lemahnya pemahaman tentang diskriminasi gender di kalangan aparat penegak hukum dan penyusun peraturan, dampak covid-19 berdampak terhadap permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat yang berakibat terhadap peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan, belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga layanan dan pemberian layanan komprehensif bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO, dan belum terintegrasinya data terkait perempuan korban kekerasan dan TPPO
- 4) Partisipasi masyarakat dan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan: belum optimalnya peran lembaga masyarakat (profesi, dunia usaha, media, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan) dalam pemberdayaan perempuan; belum tersusunya basis data terkait partisipasi lembaga profesi dan dunia usia, media, dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam pemberdayaan perempuan; belum adanya pedoman dan panduan teknis berupa metode dan cara dalam mendorong/memandu partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan

b. Permasalahan perlindungan anak

- 1) Pemenuhan hak anak: Belum mencapai predikat KLA; capaian beberapa indikator pemenuhan hak anak masih rendah seperti kepemilikan akte kelahiran, lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga, puspaga, puskesmas ramah anak, kampung anak sejahtera, tingkat partisipasi sekolah jenjang pendidikan menengah, sekolah ramah anak, pusat kreativitas anak, ruang bermain ramah anak, rute aman dan selamat ke/dari sekolah (RASS), media informasi layak anak (TeSA: Telepon Sahabat Anak), PISA (Pusat Informasi Sahabat Anak, daerah mengembangkan model pelatihan partisipasi anak dalam perencanaan dan pembangunan (PAPP), pelatihan Pelopor dan Pelapor (2P); penggalian dan pemanfaatan dana selain APBN dan APBD serta APBDesa untuk pemenuhan hak anak seperti dana CSR dan dana swasta dan swadaya masyarakat
- 2) Perlindungan khusus anak: tingginya kasus kekerasan terhadap anak, terjadinya berbagai praktik buruk seperti pekerja anak, anak berhadapan dengan hukum, perkawinan anak, anak terlantar, serta anak berkebutuhan khusus, covid-19 diperkirakan dapat berakibat terhadap peningkatan kasus-kasus perlindungan khusus anak
- 3) Partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak: belum optimalnya peran lembaga masyarakat (profesi, dunia usaha, media, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan) dalam perlindungan anak; belum tersusunya basis data terkait partisipasi lembaga profesi dan dunia usia, media, dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam perlindungan anak; belum adanya pedoman dan panduan teknis

berupa metode dan cara dalam mendorong/memandu partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan perlindungan anak.

c. Permasalahan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1) Kualitas hidup perempuan: masih tingginya angka kematian ibu melahirkan, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang rendah, pengeluaran per kapita perempuan jauh lebih rendah dibanding laki-laki, perempuan dilegislatif belum mencapai kuota yang ditetapkan regulasi

2) Perlindungan Hak Perempuan: tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, diranah privat (KDRT) maupun ranah publik, tingginya tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan untuk eksplorasi seksual komersil dan kerja paksa, rendahnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Tenaga Kerja Perempuan di sektor informal, belum optimalnya kelembagaan perlindungan hak perempuan (UPTD PPA atau P2TP2A) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, belum optimalnya perlindungan terhadap kelompok lansia, penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi dan perlakuan kurang adil, lemahnya pemahaman tentang diskriminasi gender di kalangan aparat penegak hukum dan penyusun peraturan, dampak covid-19 berdampak terhadap permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat yang berakibat terhadap peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan, belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga layanan dan pemberian layanan komprehensif bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO, dan belum terintegrasinya data terkait perempuan korban kekerasan dan TPPO

3) Partisipasi masyarakat dan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan: belum optimalnya peran lembaga masyarakat (profesi, dunia usaha, media, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan) dalam pemberdayaan perempuan; belum tersusunya basis data terkait partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam pemberdayaan perempuan; belum adanya pedoman dan panduan teknis berupa metode dan cara dalam mendorong/memandu partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan

d. Permasalahan perlindungan anak

1) Pemenuhan hak anak: Belum mencapai predikat KLA; capaian beberapa indikator pemenuhan hak anak masih rendah seperti kepemilikan akte kelahiran, lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga, puspaga, puskesmas ramah anak, kampung anak sejahtera, tingkat partisipasi sekolah jenjang pendidikan menengah, sekolah ramah anak, pusat kreativitas anak, ruang bermain ramah anak, rute aman dan selamat ke/dari sekolah (RASS), media informasi layak anak (TeSA: Telepon Sahabat Anak), PISA (Pusat Informasi Sahabat Anak, daerah mengembangkan model pelatihan partisipasi anak dalam perencanaan dan pembangunan (PAPP), pelatihan Pelopor dan Pelapor (2P); penggalian dan pemanfaatan dana selain APBN dan APBD serta APBDesa untuk

- pemenuhan hak anak seperti dana CSR dan dana swasta dan swadaya masyarakat
- 2) Perlindungan khusus anak: tingginya kasus kekerasan terhadap anak, terjadinya berbagai praktik buruk seperti pekerja anak, anak berhadapan dengan hukum, perkawinan anak, anak terlantar, serta anak berkebutuhan khusus, covid-19 diperkirakan dapat berakibat terhadap peningkatan kasus-kasus perlindungan khusus anak
 - 3) Partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak: belum optimalnya peran lembaga masyarakat (profesi, dunia usaha, media, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan) dalam perlindungan anak; belum tersusunnya basis data terkait partisipasi lembaga profesi dan dunia usia, media, dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam perlindungan anak; belum adanya pedoman dan panduan teknis berupa metode dan cara dalam mendorong/memandu partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan perlindungan anak.

3.3 Telahaan terhadap Renstra Renstra BKKBN (Perka BKKBN Nomor 6 tahun 2020

Isu strategis yang perlu mendapat perhatian:

- a. Terkait pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan
 - 1) Bonus demografi (*Demographic dividend*); kebijakan pembangunan diarahkan melalui peningkatan produktivitas angkatan kerja, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda untuk membentuk SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter.
 - 2) Penduduk yang menua (*Aging population*); perubahan struktur umur penduduk Indonesia yang secara perlahan semakin “menua” akibat dari pengendalian TFR dan perbaikan status kesehatan. Pengelolaan penduduk kelompok lansia masih sangat mengandalkan pada keluarga dan komunitas. Keterbatasan kemampuan keluarga dalam mengelola kualitas hidup lansia akan menjadikan lansia rentan, dan potensi permasalahan yang akan muncul akibat penduduk yang menua akan berdampak pada berbagai sektor pembangunan apabila kelompok usia lansia tidak mendapatkan perhatian dan intervensi yang tepat.
 - 3) Pendekatan siklus hidup berbasis perencanaan hidup berkeluarga; kebijakan pembangunan manusia dilakukan berdasarkan siklus hidup dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas. Narasi ini, bahkan akan lebih komprehensif apabila dimulai dari gagasan perencanaan dari tahap pra berkeluarga (perencanaan kehidupan berkeluarga), merencanakan keinginan untuk memiliki anak termasuk jumlah anak yang dikehendaki, proses kehamilan yang merupakan fase yang juga penting dalam proses tumbuh kembang anak, 1.000 Hari Pertama Kehidupan (periode yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun), pendidikan anak usia dini (pra sekolah) sampai dengan usia sekolah, remaja dengan berbagai pendekatannya dalam penyiapan generasi bangsa yang bekualitas menuju usia produktif/bekerja serta perhatian terhadap kelanjutusiaan (seluruh tahapan kehidupan);

- 4) satu data kependudukan; Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Disatu sisi, Pendataan Keluarga (PK) yang menjadi tugas dan kewenangan BKKBN, harus dapat diintegrasikan dengan data sektor lain, seperti Sensus Penduduk (SP), serta Data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), sehingga dapat terwujud satu data yang lengkap baik guna mendukung perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional, maupun untuk mendukung operasionalisasi program/kegiatan Bangga Kencana di lini lapangan.
- b. Terkait pemenuhan layanan dasar
- 1) Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi
 - 2) Penurunan penggunaan kontrasepsi modern (*mCPR*)
 - 3) Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga, ASFR cenderung masih tinggi
 - 4) Kebutuhan ber-KB PUS yang belum terlayani (*unmet need*) masih tinggi
 - 5) Prevalensi stunting masih tinggi; yang perlu mendapat perhatian perlunya edukasi/sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja sebagai bekal memasuki kehidupan berkeluarga, agar para calon ibu memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan stimulasi bagi janin, memeriksakan kandungan minimal empat kali selama kehamilan (program 1.000 HPK) serta peningkatan pemahaman orangtua mengenai pola asuh yang baik dan menjaga kesehatan lingkungan.
- c. Terkait membangun kebudayaan dan karakter bangsa
- 1) Rendahnya keluarga yang mengetahui fungsi keluarga; (agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan)
 - 2) Tingginya kasus pernikahan usia anak

Potensi dan Permasalahan yang ada:

- a. Struktur penduduk Indonesia menunjukkan ciri positif, namun beberapa permasalahan pengendalian penduduk yang perlu mendapat perhatian:
- 1) Angka kelahiran total masih perlu ditekan
 - 2) Kurangnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan daerah yang menangani pengendalian penduduk
 - 3) Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan
 - 4) Masih rendahnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) yang berarti rendahnya peran pemerintah daerah
 - 5) Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang isu-isu kependudukan
- b. Upaya mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan TFR 2,1 tahun 2024 diperlukan dukungan dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan terkait
- c. Komitmen terhadap aksi global terhadap program pembangunan kesehatan dan keluarga berencana seperti Program Aksi ICPD*, SDGs, Family Planning 2020, permasalahan yang perlu menjadi perhatian:

- 1) Tingginya disparitas angka prevalensi kontrasepsi (CPR) dan Unmet Need
 - 2) Tingginya peserta KB yang putus pakai (drop out) disertai rendahnya kesertaan KB MKJP dan KB Pria
 - 3) Belum optimalnya sistem sinkronisasi faskes yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ke dalam SIM BKBN
 - 4) Masih lemahnya kapasitas dan kelembagaan bidang KBKR di daerah
 - 5) Belum optimalnya cakupan dan kualitas pelayanan KB pasca persalinan (KB-PP)
- d. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama bagi anak dan remaja serta memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian individu dari usia dini sampai dewasa. Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian:
- 1) Belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
 - 2) Tuntutan baru dalam membangun keluarga bagi sebagian masyarakat (generasi milenial dan generasi Z)
 - 3) Kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/penyiapan kehidupan berkeluarga
 - 4) Perubahan struktur keluarga dan mobilitas anggota keluarga yang menyebabkan berkurangnya kualitas hubungan antar anggota keluarga
 - 5) Masih lemahnya kualitas hidup lansia dan belum optimalnya kemampuan keluarga dalam melakupan pendampingan perawatan jangka panjang lansia
 - 6) Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga
 - 7) Masih terjadi disintegrasi bidang pembangunan keluarga lintas sektor
- e. Intervensi komunikasi yang dikenal sebagai “komunikasi perubahan perilaku” atau “*behavior change communication*” (BCC) digunakan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat guna memberikan dampak terhadap tujuan program yang diimplementasikan. Permasalahan yang perlu menjadi perhatian:
- 1) Belum maksimalnya strategi advokasi dan pengelolaan promosi/KIE melalui berbagai jenis media
 - 2) Kurang optimalnya sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam advokasi KIE dan penggerakan lini lapangan
 - 3) Kondisi kelembagaan yang belum sepenuhnya menunjang tugas dan fungsi advokasi dan KIE program Bangga Kencana
 - 4) Belum optimalnya fokus dan kesinambungan pengegerakan mekanisme operasional (mekop) lini lapangan
 - 5) Belum terbangunnya mekanisme penjaringan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat secara efektif dalam advokasi, KIE dan penggerakkan program Bangga Kencana
 - 6) Perlunya peningkatan kualitas data basis program Bangga Kencana

3.4 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Misi Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021,

maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPPPKBP3A Tahun 2020 adalah seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Renja DPPKB3A Tahun 2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak serta Pemenuhan Hak Anak	Terpenuhinya Hak Anak	Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)
		Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	1. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan 2. Rasio Kekerasan Terhadap Anak
2.	Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	1. Keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif 2. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif 3. Persentase besaran anggaran responsive gender terhadap total anggaran Belanja Langsung APBD
3.	Menurunkan Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Menurunnya Angka kelahiran pada WUS 15-19 Tahun	ASFR 15-19 Tahun Laporan Keuangan
		Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi Modern	mCPR
4.	Meningkatkan pencegahan Stunting	Meningkatnya Jumlah Keluarga yang ikut BKB	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)

5.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPPKBP3A	Meningkatnya Akuntabilitas DPPKBP3A	Kinerja	1. Nilai DPPKBP3A 2. Level Maturitas SPIP 3. Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan DPPKBP3A	SAKIP
----	---	-------------------------------------	---------	--	-------

3.5 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, selain menjalankan program rutin, Dinas Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan urusan wajib dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Oleh sebab itu, program-program yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi daerah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.

Secara umum, rencana program dan kegiatan DPPKBP3A Pasaman Barat Tahun 2023 tertuang dalam 10 (sepuluh) program yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) kegiatan, seperti terlihat pada tabel T-C.33 berikut:

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Pasaman Barat

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraa n Capaian Target RKPd Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kodefikasi Program Unggulan Daerah
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						552,959,271							533,768,456	
2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Percentase ARG pada belanja langsung APBD	%	%	%	8 %	83,079,880						8 %	84,741,477	
2	8	2	02.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan	Percentase Anggaran Responsive Gender (ARG)	%	%	8 %	30,075,299						8 %	30,075,299	
2	8	2	02.01	3 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan			50 Perangkat Daerah	30,075,299	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan pengamanan agama, nilai-nilai	Pokja PUG, Focal Point, Driver PUG	50 Perangkat Daerah	30,075,299	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera
2	8	2	02.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan	Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif	%	%	30 %	53,004,581						30 %	54,666,178	

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kodefikasi Program Unggulan Daerah	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	8	2	02.02	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Peningkatan	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan			31 Organisasi	53,004,581	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pengamanan ajaran agama, nilai-nilai	Organisasi Perempuan	31 Organisasi	54,666,178	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	%	%	0,23 %	136,499,182				0,23 %	118,829,165		
2	8	3	02.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	orang	orang	150 orang	40,000,000				150 orang	20,000,000		
2	8	3	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan			1 Dokumen	40,000,000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kab.Pasaman Barat	1 Dokumen	20,000,000	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera
					Jumlah Peserta Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan				130 Orang					130 Orang			
2	8	3	02.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan	Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Lavanhan	%	%	100 %	86,499,182				100 %	88,829,165		

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kodefikasi Program Unggulan Daerah
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	8	3	02.02	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Percentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Layanan		12 Layanan 100 %	86,499,182	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan	Meningkatkan pengamanan, Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pengamanan, Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perempuan korban kekerasan	12 Layanan 100 %	88,829,165	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera	
2	8	3	02.03														
2	8	3	02.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	%	%	100 %	10,000,000					100 %	10,000,000	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera	
2	8	3	02.03														
2	8	4		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	TPAK Perempuan	%	%	45.6 %	19,755,500					45.6 %	20,150,610		

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kodefikasi Program Unggulan Daerah		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	8	4	02.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hal Anak Tingkat Daerah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK)	%		%	45.6 %	19,755,500				45.6 %	20,150,610			
2	8	4	02.01	3 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas				1 Dokumen	19,755,500	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengentasan kemiskinan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat	1 Dokumen	20,150,610	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera	
					Jumlah Pekerja Wanita yang Mendapatkan Pelatihan				60 Orang					60 Orang				
2	8	5		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Percentase OPD yang menyediakan data terpilih gender	%		%	97 %	31,248,000				97 %	22,022,960			
2	8	5	02.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah	Percentase OPD yang Menyediakan Data Terpilih Gender	%		%	97 %	31,248,000				97 %	22,022,960			
2	8	5	02.01	1 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	31,248,000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pengamalan ajaran agama, nilai-nilai luhur dan budaya	Organisasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	22,022,960	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera
					Jumlah Dokumen Pemanfaatan Data Gender dan Anak dan Tersedianya Buku Profil Gender dan				1 Dokumen						1 Dokumen			

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kodefikasi Program Unggulan Daerah	
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				Jumlah SDM yang Terlatih			41 Orang							41 Orang				
2	8	6		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)	Skor		Skor	700 Skor	65,033,025				700 Skor	66,333,686			
2	8	6	02.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Total Score Pemenuhan Hak Anak (Klaster 1-5)	Score		Score	700 Score	65,033,025				700 Score	66,333,686			
2	8	6	02.01	1	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)				60 Organisasi	35,000,000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan pengamanan agama, nilai-nilai luhur dan budaya	OPD, Kecamatan dan Nagari	60 Organisasi	35,000,000	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera
2	8	6	02.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan			1 Dokumen	30,033,025	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan pengamanan agama, nilai-nilai	OPD, Kecamatan dan Nagari	1 Dokumen	31,333,686	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kodefikasi Program Unggulan Daerah
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							90 %				Berdaya Saing	luhur dan budaya		90 %			
2	8	7		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	% Penurunan kasus kekerasan terhadap anak0	%		%	0,01 %	217,343,684				0,01 %	221,690,558		
2	8	7	02.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan terhadap anak per 100 jiwa anak	Rasio		Rasio	0.02 Rasio	35,000,000				0.02 Rasio	45,000,000		
2	8	7	02.01	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan				1 Dokumen	35,000,000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan pengamanan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Anak-Anak,Orang Tua dan guru	1 Dokumen	45,000,000	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera
2	8	7	02.02		Jumlah Peserta Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak				200 Orang					200 Orang			
2	8	7	02.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak yang Mendapat Pelayanan	%		%	100 %	132,343,684				100 %	126,690,558		

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kodefikasi Program Unggulan Daerah	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	8	7	02.02	1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan		20 Orang	25,000,000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pengamanan, Sumber Daya Manusiaya Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Anak korban kekerasan	20 Orang	25,000,000	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera		
					Percentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang Mendapat Pelayanan		100 %						100 %				
2	8	7	02.02	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan		12 Layanan	107,343,684	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Anak korban kekerasan	12 Layanan	101,690,558	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera		
					Percentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang Mendapat Pelayanan		100 %						100 %				
2	8	7	02.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat	Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan	%		%	100 %	50,000,000				100 %	50,000,000		
2	8	7	02.03	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pengurus P2TP2A	1 Dokumen	50,000,000	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kodefikasi Program Unggulan Daerah		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan			100 %				Berdaya Saing	Iluhur dan budaya		100 %					
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						9,187,191,594							9,654,260,584		
2	14	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	%	%	100 %	6,690,574,564						100 %	7,003,405,678		
2	14	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	5,644,031,668					100 %	5,881,900,000		
2	14	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			45 Orang /bulan	5,262,131,668	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.	ASN DPPKBP3A	45 Orang/bulan	5,500,000,000	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera
2	14	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			30 Dokumen	304,500,000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.	ASN DPPKBP3A	30 Dokumen	304,500,000	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kodefikasi Program Unggulan Daerah
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Jumlah Non PNS (PTT/THL) Penunjang Administrasi Perkantoran dan Penerima Honorarium Pegawai	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			22 Orang					Berdaya Saing	bersih dan inovatif	22 Orang		2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera	
2	14	1	02.02									Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ASN DPPKBP3A	80 Dokumen	77,400,000
			Jumlah Petugas Pengelola Keuangan yang Menerima Honorarium				80 Dokumen	77,400,000	5 Orang					Berdaya Saing	5 Orang		2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera
2	14	1	02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Percentase terpenuhinya kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah						100 %	34,858,400			100 %	34,858,400
2	14	1	02.03	6		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 Laporan	34,858,400	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Barang Milik Daerah	2 Laporan	34,858,400	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera
2	14	1	02.05	Administrasi Kepergawainan Perangkat Daerah		Percentase terpenuhinya kegiatan Administrasi Kepergawainan Perangkat Daerah	%		%	100 %	60,803,642				100 %	60,803,642	

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kodefikasi Program Unggulan Daerah
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	14	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			10 Orang	60,803,642	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Berkualitas Dan	ASN DPPKBP3A	10 Orang	60,803,642	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera
2	14	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	%	100 %	292,190,880					100 %	307,190,880		
2	14	1	02.06														
2	14	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	25,059,280	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	ASN DPPKBP3A	12 Paket	35,059,280	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera
2	14	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang Dibutuhkan			12 Bulan	25,175,700	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	ASN DPPKBP3A	12 Bulan	25,175,700	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera
2	14	1	02.06			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket								
2	14	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			12 Paket	32,061,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,	ASN DPPKBP3A	12 Paket	32,061,500	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kodefikasi Program Unggulan Daerah	
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Alat Pembersih				12 Bulan				Berdaya Saing	bersih dan inovatif		12 Bulan				
2	14	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	17,135,000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik,	ASN DPPKBP3A	12 Paket	22,135,000	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera
2	14	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100 Laporan	192,759,400	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik,	ASN DPPKBP3A	100 Laporan	192,759,400	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera
2	14	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Makan/Minum Rapat Koordinasi Jumlah Rapat Koordinasi dari Pemerintah Provinsi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Bulan	192,759,400	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik,	ASN DPPKBP3A	100 Laporan	192,759,400	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera
2	14	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			6 Unit	98,667,621	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik,	ASN DPPKBP3A	6 Unit	108,667,621	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kodefikasi Program Unggulan Daerah
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	14	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	107,037,218	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Berkualitas Dan	ASN DPPKBP3A	1 Unit	117,000,000	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera
2	14	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	%	%	100 %	91,334,935					100 %	101,334,935		
2	14	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	91,334,935	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Berkualitas Dan	Kantor DPPKBP3A	12 Laporan	101,334,935	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera
2	14	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	%	%	100 %	361,650,200					100 %	391,650,200		
2	14	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan			67 Unit	189,905,000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Berkualitas Dan	Barang Milik Daerah (BMD)	67 Unit	199,905,000	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera
2	14	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			48 Unit	62,569,200	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Berkualitas Dan	Barang Milik Daerah (BMD)	48 Unit	72,569,200	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kodefikasi Program Unggulan Daerah	
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	14	1	02.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 Unit	109,176,000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Berkualitas Dan	Peningkatan Sumber Daya Manusi Yang Berkualitas Dan	Barang Milik Daerah (BMD)	3 Unit	119,176,000	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera	
2	14	2		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate (TFR)	Indeks		Indeks	3,05 Indeks	114,383,457					3,05 Indeks	118,809,565		
2	14	2	02.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Peserta Sosialisasi	orang		orang	240 orang	78,352,457					240 orang	82,778,565		
2	14	2	02.01	9 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Peserta Sosialisasi PIK R/M di Sekolah-sekolah				200 Orang	52,491,151	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan	Pasangan Usia Subur (PUS)	200 Orang	56,917,259	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan				10 Satuan Pendidikan						10 Satuan Pendidikan			
2	14	2	02.01	15 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,				12 Laporan	25,861,306	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan	Pasangan Usia Subur (PUS)	12 Laporan	25,861,306	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kodefikasi Program Unggulan Daerah		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
						Terlaksananya Tindak Lanjut dan Audit Stunting		1 Keg				Berdaya Saing		1 Keg				
2	14	2	02.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Data Program Bangga Kecana	Dokumen	Dokumen	132 Dokumen	36,031,000					132 Dokumen	36,031,000			
2	14	2	02.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya			132 Dokumen	20,000,000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penigkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan	Penduduk Kabupaten Pasaman Barat	132 Dokumen	20,000,000	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera
2	14	2	02.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			132 Dokumen	16,031,000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penigkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan	Penduduk Kabupaten Pasaman Barat	132 Dokumen	16,031,000	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera
2	14	3		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan	%		%	66,5 %	1,842,942,073					66,5 %	2,032,045,341		
					Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan	%		%	66.5 %						66.5 %			

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kodefikasi Program Unggulan Daerah	
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	14	3	02.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Tersedianya Media KIE dan Operasional Penyuluhan KB Di Kecamatan	Kec		Kec	11 Kec	360,000,000					11 Kec	360,000,000		
					Tersedianya Media KIE dan Operasional Penyuluhan KB Di Kecamatan	Faskes		Faskes	22 Faskes						22 Faskes			
2	14	3	02.01	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,			20 Organisasi	30,000,000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penigkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan	Pasangan Usia Subur (PUS)	20 Organisasi	30,000,000	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera
2	14	3	02.01	2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan			12 Dokumen	85,000,000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penigkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan	Pasangan Usia Subur (PUS)	12 Dokumen	85,000,000	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera
2	14	3	02.01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,			12 Dokumen	25,000,000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penigkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan	Pasangan Usia Subur (PUS)	12 Dokumen	25,000,000	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera
2	14	3	02.01	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,			66 Laporan	100,000,000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penigkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan	Pasangan Usia Subur (PUS)	66 Laporan	100,000,000	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kodefikasi Program Unggulan Daerah
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	14	3	02.01	7 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan)		132 Laporan	120,000,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penigkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan	Pasangan Usia Subur (PUS)	132 Laporan	120,000,000	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera	
2	14	3	02.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Tersedianya operasional pembinaan Program KB Bagi Masyarakat oleh kader	Nagari	Nagari	19 Nagari	91,200,000					19 Nagari	91,200,000		
2	14	3	02.02	4 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		425 Orang	91,200,000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penigkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan	Tenaga Penyuluhan KB dan Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	425 Orang	91,200,000	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera	
2	14	3	02.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah	Terlaksananya Pelayanan KB MKJP	Akseptor	Akseptor	1520 Akseptor	1,114,742,073					1520 Akseptor	1,303,845,341		
2	14	3	02.03	1 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan			264 Laporan	58,815,000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penigkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan	Pasangan Usia Subur	264 Laporan	58,815,000	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera
2	14	3	02.03	3 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			1496 Orang	410,000,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penigkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan	Pasangan Usia Subur	1496 Orang	595,030,341	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kodefikasi Program Unggulan Daerah	
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							1496 Aksesor				Berdaya Saing			1496 Aksesor				
2	14	3	02.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB			43 Unit	545,927,073	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penigkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan	Pasangan Usia Subur	43 Unit	550,000,000	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera
2	14	3	02.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas			264 Laporan	100,000,000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penigkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan	Pasangan Usia Subur	264 Laporan	100,000,000	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera
2	14	3	02.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam	Tersedianya operasional pembinaan Program KB Bagi Masyarakat oleh kader	Kecamatan	Kecamatan	11 Kecamatan	277,000,000						11 Kecamatan	277,000,000		
2	14	3	02.04		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguanan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertakan Ber-KB			10 Organisasi	150,000,000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penigkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan	Masyarakat dan kader	10 Organisasi	150,000,000	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera	
								11 Kecamatan			Berdaya Saing				11 Kecamatan			

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kodefikasi Program Unggulan Daerah
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	14	3	02.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan)		19 Kampung	127,000,000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Masyarakat dan kader	19 Kampung	127,000,000	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera
2	14	4		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	%	%	65 %	539,291,500					65 %	500,000,000		
					Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	%	%	70 %						70 %			
2	14	4	02.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Tribina yang Dibentuk dan Mendapatkan Pembinaan di Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	11 Kecamatan	539,291,500					11 Kecamatan	500,000,000		
2	14	4	02.01	1	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja		45 Kelompok	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Kelompok Tribina	45 Kelompok	45,000,000	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera
2	14	4	02.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,		20 Unit	180,000,000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Kelompok Tribina	20 Unit	180,000,000	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kodefikasi Program Unggulan Daerah		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	14	4	02.01	5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, BKR, BKL)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, BKR, BKL)			465 Orang	239,291,500	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penigkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan	Kelompok Tribina	465 Orang	200,000,000	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera
2	14	4	02.01	6	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R			231 Kelompok	75,000,000	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Penigkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan	Kelompok Tribina	231 Kelompok	75,000,000	2.04 : Pasbar Maju dan Sejahtera
TOTAL								9,740,150,865							10,188,029,040			

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023 merupakan implementasi tahun ke-3 Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang secara simultan disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan agar lebih focus mendukung pencapaian tujuan Strategis DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026, yakni Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak serta Pemenuhan Hak Anak, Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Menurunkan Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS usia 15-49 Tahun, Meningkatkan pencegahan Stunting dan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPPKBP3A. Prioritas Pembangunan diterjemahkan kedalam 7 sasaran prioritas pembangunan melalui pelaksanaan Program/Kegiatan pembangunan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, program/kegiatan yang dilaksanakan oleh DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat harus mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) kepala DPPKBP3A, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tercapainya Visi dan Misi Bupati Pasaman Barat. Melalui telaahan terhadap hasil evaluasi terhadap program/kegiatan DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 serta memperhatikan isu-isu global maka diperoleh rumusan yang terdiri dari 10 Program (Teknis dan Rutin), 25 Kegiatan dan 48 sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPPKBP3A Tahun 2023 dengan lokasi kegiatan sebagian besar berada di Kabupaten Pasaman Barat dengan total kebutuhan dana sebesar Rp 9.740.150.865 (Sembilan Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) sebagaimana disajikan pada table 4.1.

Berdasarkan analisis kebutuhan, rumusan kebutuhan program dan kegiatan DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat disajikan pada table dibawah ini:

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah																					
Kabupaten Pasaman Barat																					
Tahun 2023																					
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																					
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																					
Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja								
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target							
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN																		
2	8	2 02.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota																		
2	8	2 02.01	3 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anggaran yang Responsive Gender (ARG)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 %	50 Perangkat Daerah	8 %	30,075,299	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	8 %						
2	8	2 02.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan																		
2	8	2 02.02	2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 %	31 Organisasi	30 %	53,004,581	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	8 %						
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN																		
2	8	3 02.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
2	8	3 02.01	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,23 %	1 Dokumen	0,23 %	40,000,000	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	0,23 %						

					Jumlah Peserta Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan				130 Orang							
2	8	3	02.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan					86,499,182					88,829,165		
2	8	3	02.02	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Layanan Pengaduan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,23 %	12 Layanan	100 %	86,499,182	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	0,23 %	88,829,165
						Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Layanan Pengaduan			100 %							
2	8	3	02.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					10,000,000					10,000,000		
2	8	3	02.03	2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,23 %	36 Orang	100 %	10,000,000	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	0,23 %	10,000,000
						Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan			100 %							
2	8	4		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA									19,755,500			20,150,610
2	8	4	02.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									19,755,500			20,150,610
2	8	4	02.01	3 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	TPAK Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45.6 %	1 Dokumen	45.6 %	19,755,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	TPAK Perempuan	45.6 %	20,150,610
						Jumlah Pekerja Wanita yang Mendapatkan Pelatihan (Orang)				60 Orang						
2	8	5		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK									31,248,000			22,022,960
2	8	5	02.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah									31,248,000			22,022,960

2	8	5	02.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menyediakan data terpilah gender	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Persentase OPD yang Menyediakan Data Terpilah Gender	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 %	1 Dokumen	97 %		31,248,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang menyediakan data terpilah gender	97 %		22,022,960	
							Jumlah Dokumen Pemanfaatan Data Gender dan Anak dan Tersedianya Buku Profil Gender dan Anak				1 Dokumen										
							Jumlah SDM yang Terlatih				41 Orang										
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)									65,033,025							66,333,686
2	8	6	02.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota									65,033,025							66,333,686
2	8	6	02.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	700 Skor	60 Organisasi	700 score		35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)	700 Skor		35,000,000	
						Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)					700 score										
2	8	6	02.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	700 Skor	1 Dokumen	700 score		30,033,025	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)	700 Skor		31,333,686	
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK									217,343,684							221,690,558
2	8	7	02.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									35,000,000							45,000,000
2	8	7	02.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	% Penurunan kasus kekerasan terhadap anak0	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Menurunnya Rasio kekerasan terhadap anak per 100 jiwa anak	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,01 %	1 Dokumen	0,02 Rasio		35,000,000	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		% Penurunan kasus kekerasan terhadap anak0	0,01 %		45,000,000	
						Jumlah Peserta Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak					200 Orang										
2	8	7	02.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah									132,343,684							126,690,558
2	8	7	02.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	% Penurunan kasus kekerasan terhadap anak0	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak yang Mendapat Pelayanan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,01 %	20 Orang	100 %		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		% Penurunan kasus kekerasan terhadap anak0	0,01 %		25,000,000	

					Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang Mendapat Pelayanan				100 %								
2	8	7	02.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	% Penurunan kasus kekerasan terhadap anak0	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak yang Mendapat Pelayanan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,01 %	12 Layanan	100 %	107,343,684	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	% Penurunan kasus kekerasan terhadap anak0	0,01 %	101,690,558
2	8	7	02.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah								50,000,000				50,000,000
2	8	7	02.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	% Penurunan kasus kekerasan terhadap anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan LembagaPenyedia Layanan bagi Anak yangMemerlukan Perlindungan Khusus TingkatDaerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,01 %	1 Dokumen	100 %	50,000,000	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	% Penurunan kasus kekerasan terhadap anak	0,01 %	50,000,000
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								9,187,191,594				9,654,260,584
2	14	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6,690,574,564				7,003,405,678
2	14	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5,644,031,668				5,881,900,000
2	14	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	45 Orang/bulan	100 %	5,262,131,668	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5,500,000,000
2	14	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terpenuhinya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Dokumen	100 %	304,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	304,500,000

					Jumlah Non PNS (PTT/THL) Penunjang Adminitrasi Perkantoran dan Penerima Honorarium Pegawai				22 Orang							
2	14	1	02.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	80 Dokumen	100 %	77,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	77,400,000
					Jumlah Petugas Pengelola Keuangan yang Menerima Honorarium					5 Orang						
2	14	1	02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								34,858,400				34,858,400
2	14	1	02.03	6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terpenuhinya kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	34,858,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	34,858,400
2	14	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								60,803,642			
2	14	1	02.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terpenuhinya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Orang	100 %	60,803,642	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	60,803,642
2	14	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								292,190,880			
2	14	1	02.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	25,059,280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	35,059,280
2	14	1	02.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah ATK yang Dibutuhkan	Persentase terpenuhinya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	25,175,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	25,175,700
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 Paket						
2	14	1	02.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase terpenuhinya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	12 Paket	100 %	32,061,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	32,061,500
					Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Alat Pembersih					12 Bulan						

2	14	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase terpenuhinya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	17,135,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	22,135,000
2	14	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Laporan	100 %	192,759,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	192,759,400
							Jumlah Penyediaan Makan/Minum Rapat Koordinasi Jumlah Rapat Koordinasi dari Pemerintah Provinsi dan Pusat K/L yang Dikukti				12 Bulan							
2	14	1	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									205,704,839					225,667,621
2	14	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Barang dan sarana penunjang urusan pemerintah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Unit	100 %	98,667,621	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	108,667,621
2	14	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Barang dan sarana penunjang urusan pemerintah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	107,037,218	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	117,000,000
2	14	1	02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									91,334,935					101,334,935
2	14	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	91,334,935	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	101,334,935
2	14	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									361,650,200					391,650,200
2	14	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	67 Unit	100 %	189,905,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	199,905,000
2	14	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	48 Unit	100 %	62,569,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	72,569,200
2	14	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	100 %	109,176,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	119,176,000
2	14	2		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK									114,383,457					118,809,565
2	14	2	02.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka									78,352,457					82,778,565

2	14	2	02.01	9	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Total Fertility Rate (TFR)	Jumlah Peserta Sosialisasi PIK R/M di Sekolah-sekolah	Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan PESerta Sosialisasi	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,05 Indeks	200 Orang	240 orang	52,491,151	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Total Fertility Rate (TFR)	3,05 Indeks	56,917,259
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				10 Satuan Pendidikan							
2	14	2	02.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Total Fertility Rate (TFR)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan PESerta Sosialisasi	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,05 Indeks	12 Laporan	240 orang	25,861,306	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Total Fertility Rate (TFR)	3,05 Indeks	25,861,306
							Terlaksananya Tindak Lanjut dan Audit Stunting				1 Keg							
2	14	2	02.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										36,031,000				36,031,000
2	14	2	02.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Total Fertility Rate (TFR)	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Tersedianya Laporan Data Program Bangga Kecana	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,05 Indeks	132 Dokumen	132 Dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Total Fertility Rate (TFR)	3,05 Indeks	20,000,000
2	14	2	02.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Total Fertility Rate (TFR)	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Tersedianya Laporan Data Program Bangga Kecana	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,05 Indeks	132 Dokumen	132 Dokumen	16,031,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Total Fertility Rate (TFR)	3,05 Indeks	16,031,000
2	14	3		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)										1,842,942,073				2,032,045,341
2	14	3	02.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal										360,000,000				360,000,000
2	14	3	02.01	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Tersedianya Media KIE dan Operasional Penyalah KB Di Kecamatan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,5 %	20 Organisasi	11 Kecamatan, Faskes	30,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	66,5 %	30,000,000
						Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)				66.5 %				Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	66.5 %			

2	14	3	02.01	2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Angka pemakaian kontrasepsi modern / Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Penyuluhan KB Di Kecamatan	Tersedianya Media KIE dan Operasional Penyuluhan KB Di Kecamatan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,5 %	12 Dokumen	11 Kecamatan, Faskes	85,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Angka pemakaian kontrasepsi modern / Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	66,5 %	85,000,000
					Angka pemakaian kontrasepsi modern / Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)				66.5 %						Angka pemakaian kontrasepsi modern / Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	66.5 %		
2	14	3	02.01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Angka pemakaian kontrasepsi modern / Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Tersedianya Media KIE dan Operasional Penyuluhan KB Di Kecamatan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,5 %	12 Dokumen	11 Kecamatan, Faskes	25,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Angka pemakaian kontrasepsi modern / Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	66,5 %	25,000,000
					Angka pemakaian kontrasepsi modern / Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)				66.5 %						Angka pemakaian kontrasepsi modern / Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	66.5 %		
2	14	3	02.01	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Angka pemakaian kontrasepsi modern / Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Tersedianya Media KIE dan Operasional Penyuluhan KB Di Kecamatan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,5 %	66 Laporan	11 Kecamatan, Faskes	100,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Angka pemakaian kontrasepsi modern / Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	66,5 %	100,000,000

				Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)				66.5 %					Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	66.5 %		
2	14	3	02.01	7 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Tersedianya Media KIE dan Operasional Penyuluhan KB Di Kecamatan	66,5 %	132 Laporan	11 Kecamatan, Faskes	120,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	66,5 %	120,000,000	
					Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)			66,5 %					Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	66,5 %		
2	14	3	02.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)										91,200,000	91,200,000	
2	14	3	02.02	4 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Tersedianya operasional pembinaan Program KB Bagi Masyarakat oleh kader	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,5 %	425 Orang	19 Nagari	91,200,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	66,5 %	91,200,000
2	14	3	02.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah										1,114,742,073	1,303,845,341	
2	14	3	02.03	1 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pelayanan KB MKJP	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,5 %	264 Laporan	1520 Aksesor	58,815,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	66,5 %	58,815,000
2	14	3	02.03		Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terlaksananya Pelayanan KB MKJP		66,5 %	1496 Orang	1520 Aksesor	410,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	66,5 %	595,030,341

2	14	3	02.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Terlaksananya Pelayanan KB MKJP	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,5 %	43 Unit	1520 Aksesor	545,927,073	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	66,5 %	550,000,000
2	14	3	02.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pelayanan KB MKJP	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,5 %	264 Laporan	1520 Aksesor	100,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	66,5 %	100,000,000
2 14 3 02.04			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan										277,000,000				277,000,000	
2	14	3	02.04	1 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Pembinaan Pembinaan Program KB bagi masyarakat oleh Kader	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,5 %	10 Organisasi	11 Kecamatan	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	66,5 %	150,000,000	
						Terlaksananya Kegiatan TNI Manunggal KB Kes dan PKK KB Kes				11 Kecamatan								
2	14	3	02.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Pembinaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Terlaksananya Pembinaan Pembinaan Program KB bagi masyarakat oleh Kader	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,5 %	19 Kampung	11 Kecamatan	127,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	66,5 %	127,000,000
2	14	4		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)										539,291,500			500,000,000	
2	14	4	02.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										539,291,500			500,000,000	

2	14	4	02.01	1	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Terlaksananya Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		65 %	45 Kelompok	11 Kecamatan	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	65 %	45,000,000
2	14	4	02.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 %	20 Unit	11 Kecamatan	180,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	65 %	180,000,000
2	14	4	02.01	5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 %	465 Orang	11 Kecamatan	239,291,500	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	65 %	200,000,000
2	14	4	02.01	6	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 %	231 Kelompok	11 Kecamatan	75,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	65 %	75,000,000
TOTAL													9,740,150,865				10,188,029,040	

BAB V **PENUTUP**

Dokumen Rencana Kerja (Renja) DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2023. Tentu saja, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja ini sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan upaya koordinasi yang lebih intense antar semua pihak sehingga program dan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, diperlukan komitmen semua pihak terkait tindak lanjut dari segala kegiatan yang dilaksanakan. Mengingat tugas pokok dan fungsi DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat sebagai OPD yang bertanggung jawab merumuskan program/kegiatan ke depan, maka tindak lanjut (*follow up*) menjadi suatu keharusan. Dengan demikian, dokumen rencana yang telah disusun tidak hanya sebatas dokumen tanpa implikasi.

Tentu saja, Renja ini membutuhkan umpan balik (*feedback*) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program di masa mendatang. Dengan demikian, program-program pembangunan akan lebih terarah dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui perencananaan yang terintegrasi.

Simpang Empat, 3 Agustus 2022
Kepala DPPKBP3A



Dr. Hj. ANNA RAHMADIA
NIP. 19820927 200805 2 001



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR:188.45/106 /BUP-PASBAR/2022

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2023

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Ketua

1. Mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023; dan
2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap kelompok kerja dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.

B. Sekretaris

1. Mengoordinasikan Penyiapan dan pendokumentasian administrasi dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023;

2. Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja masing-masing bidang dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi;
3. Menyusun agenda kerja Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023; dan
4. Melaksanakan pembahasan bersama dalam rangka menyusun Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.

C. Kelompok Kerja

1. Mengidentifikasi seluruh regulasi, pedoman dan petunjuk teknis serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023;
2. Menganalisa dan mengevaluasi realisasi capaian kinerja Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023;
3. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat 2023;
4. Melaksanakan pembahasan untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya untuk penyempurnaan Rencana Kerja;
5. Melaksanakan seluruh tahapan dalam penyusunan dokumen lengkap Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
6. Melaporkan pelaksanaan seluruh tahapan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengendalian

2. Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja masing-masing bidang dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi;
3. Menyusun agenda kerja Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023; dan
4. Melaksanakan pembahasan bersama dalam rangka menyusun Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.

C. Kelompok Kerja

1. Mengidentifikasi seluruh regulasi, pedoman dan petunjuk teknis serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023;
2. Menganalisa dan mengevaluasi realisasi capaian kinerja Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023;
3. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat 2023;
4. Melaksanakan pembahasan untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya untuk penyempurnaan Rencana Kerja;
5. Melaksanakan seluruh tahapan dalam penyusunan dokumen lengkap Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
6. Melaporkan pelaksanaan seluruh tahapan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 kepada Bupati.

KETIGA

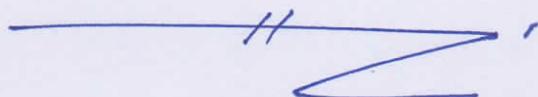
: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengendalian

KEEMPAT :

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman
Barat Tahun Anggaran 2022.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 31 Januari 2022

BUPATI PASAMAN BARAT,



HAMSUARDI

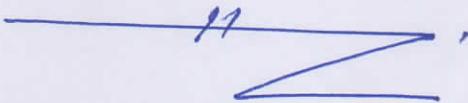
Lampiran Keputusan Bupati Pasaman Barat
 Nomor : 188.45/ 106 /Bup-PASBAR/2022
 Tanggal : 1 Januari 2022
 Tentang : Tim Penyusunan Rencana Kerja
 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA ,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KAB.PASAMAN BARAT TAHUN 2023

Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
dr. Hj. Anna Rahmadi	Kepala	Ketua
Efrini Desri, S.Tr.Keb	Sekretaris	Sekretaris
Kelompok Kerja Bidang Perencanaan dan Pelaporan		
Susry Amalya, SE		Koordinator
Junita, S.STP, MM	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
Hendri, A.Md	Kasubag Keuangan dan Aset	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi		
Yusnirwana, S.Tr.Keb	Kabid Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Koordinator
Lisdawati, A.Md.Keb	Kasi Kesertaan Keluarga Berencana	Anggota
Elmina, A.Md.Keb	Kasi Kesehatan Reproduksi	Anggota
Rina Amelia Roza, A.Md.Keb	Kasi Hubungan Antar Lini Lapangan	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk		
Hj. Mori Desi, SKM	Kabid Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	Koordinator
Sri Mulyani	Kasi Advokasi dan Pengendalian Penduduk	Anggota
Fenny Deira, SKM, MM	Kasi Data dan Informasi	Anggota
Ns. Aida Syofinar Wati	Kasi Pembinaan Ekonomi dan Ketahanan Keluarga	Anggota

Kelompok Kerja Bidang Bina Kelembagaan Perempuan		
Maryenti Anwar, SH	Kabid Bina Kelembagaan Perempuan	Koordinator
Femmi Syahfiyenti, SST, M.KM	Kasi Pemberdayaan Kelembagaan Perempuan	Anggota
Widiawati, S.Sos	Kasi Data Informasi PUG dan Anak	Anggota
Gusnita, A.Md.Keb	Kasi Pengarusutamaan Gender	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak		
Titi Susilawati, S.Pd	Kepala Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Koordinator
Hartati, SH	Kasi Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan	Anggota
Hellya Fitriani, SKM	Kasi Perlindungan dan Kesejahteraan Anak	Anggota

Ditetapkan di Simpang Empat
 Pada Tanggal 31 Januari 2022
 BUPATI PASAMAN BARAT,



HAMSUARDI



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. M. Natsir – Simpang Ampek Telp. (0753) 7464100 / Fax.(0753) 7464105
Kode Pos : 26366

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 050/ 45 /DPPKBP3A/VIII/2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera

- Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 46 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : (1) Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode 1 (satu) tahun yakni Tahun Anggaran 2023;
- (2) Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat tentang Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2023 ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 3 Agustus 2022

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



dr. Hj. ANNA RAHMADIA
NIP. 19820927 200805 2 001